

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan bahan dan penjelasan tentang rumusan masalah sehingga mendapatkan pembahasan dan jawaban yang akurat tentang penelitian, dibutuhkan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>1</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>2</sup>

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.<sup>3</sup>

Metode Penelitian jika dijabarkan berdasarkan kebiasaan dapat berarti:<sup>4</sup>

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Metode penelitian pada hakekatnya mampu memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami

---

<sup>1</sup> Choilid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997, hlm 1

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 6

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm 5.

lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>5</sup> Maka berdasarkan uraian diatas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri,<sup>6</sup> yang difokuskan untuk menginventarisasi dan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>7</sup> Penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek penelitian yuridis ini menganalisis pengaturan tanggung jawab negara terhadap pencemaran sampah plastik di Samudra Pasifik. Sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba mengkaji wujud perlindungan Samudra Pasifik dari pencemaran sampah plastik baik secara preventif maupun kuratif.

#### b. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah :<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto.op.cit, hlm 6.

<sup>6</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 57.

<sup>7</sup> Ibid, hlm 295.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,2005, hlm 93

#### a) Statute Approach

Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan yakni dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi,<sup>9</sup> dalam hal ini mengenai analisis Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional. Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>10</sup>

#### b) Case Approach

Case Approach atau pendekatan kasus yakni dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi,<sup>11</sup> dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan tanggung jawab negara dalam upaya perlindungan lingkungan laut dari sampah plastik. Kasus dapat berupa kasus yang terjadi di Samudra Pasifik maupun di perairan lepas lain. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, kajian kasus ini merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 248

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki..., *Op.Cit.*, hlm 119

<sup>12</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 34



### c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>13</sup>

#### a) Jenis Bahan Hukum

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari pembuatan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang mengikat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain :

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*
2. *International Convention for the Prevention of Pollution from the Ships 1973/1978 (MARPOL)*
3. *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping Wastes and Other Matter 1972*
4. *Paris Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources 1974*
5. *Declaration on the United Nations Conference on the Human Environment 1972*

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana. Di dalam ilmu hukum, buku-buku teks terdapat pada buku-buku mengenai *Jurisprudence* atau *Rechteorie*. Di

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 141

samping buku teks, bahan hukum lainnya dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.<sup>14</sup>

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas:<sup>15</sup>

1. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh;
2. Jurnal-jurnal hukum;
3. Pendapat para sarjana;
4. Yurisprudensi; dan
5. Hasil-hasil symposium

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi<sup>16</sup>

1. Kamus hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
3. Ensiklopedia.

#### d. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelusuran melalui media cetak maupun media elektronik terkait peraturan-peraturan internasional yang bersifat global dan regional tentang perlindungan lingkungan laut dari pencemaran.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, op,cit, hlm 141

<sup>15</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta,1997, hlm 7

<sup>16</sup>Johnny Ibrahim,*Teori dan ...*, Op.Cit., hlm 296

## b) Bahan Hukum Sekunder

Metode pengumpulan bahan hukum baik melalui literatur maupun akses internet, artikel, jurnal, surat kabar serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis peroleh dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, dan sumber-sumber lain baik dari media cetak, media elektronik, internet, dan literature hukum koleksi pribadi penulis.<sup>17</sup>

## e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penyajian bahan hukum yang penulis kumpulkan akan dijadikan satu dan dianalisis agar memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh. Analisa bahan hukum penelitian inni yakni dengan metode deskriptif-analisis dengan mengaitkan pada asas-asas hukum dan berdasar teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan yang ingin penulis bahas. Penelitian ini menggunakan interpretasi teleologis atau sosiologis.<sup>18</sup> Yaitu interpretasi yang menganggap makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Sehingga kekosongan hukum yang ada dapat dianalisis dan ditemukan solusinya demi tujuan kemasyarakatan.<sup>19</sup>

## f. Definisi Konseptual

**1. Lingkungan Samudra Pasifik** adalah segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme yang berada di permukaan laut dan dalam laut serta dasar laut Samudra Pasifik.

<sup>17</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan ...*, Op.Cit., hlm 321

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 171

<sup>19</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme ...*, Op.Cit, hlm 42



2. **Gugusan Sampah Plastik** adalah kumpulan material anorganik sisa yang sudah tidak diinginkan lagi yang tidak mudah terurai karena mengandung zat polimer sintetis beracun yang berbahaya bagi lingkungan.
3. **Perlindungan Hukum Samudra Pasifik** adalah upaya yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4. **Tanggung Jawab Negara** adalah Negara mengelola lingkungan hidup untuk rakyat tanpa menimbulkan kerugian bagi negara lain serta mengawasi perbuatan hukum rakyatnya guna mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan..

